

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan suatu negara secara terus menerus dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Menurut Todaro (2003), pembangunan dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Negara Indonesia adalah negara yang luas terdiri dari 5 pulau besar, yaitu : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Di dalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah.

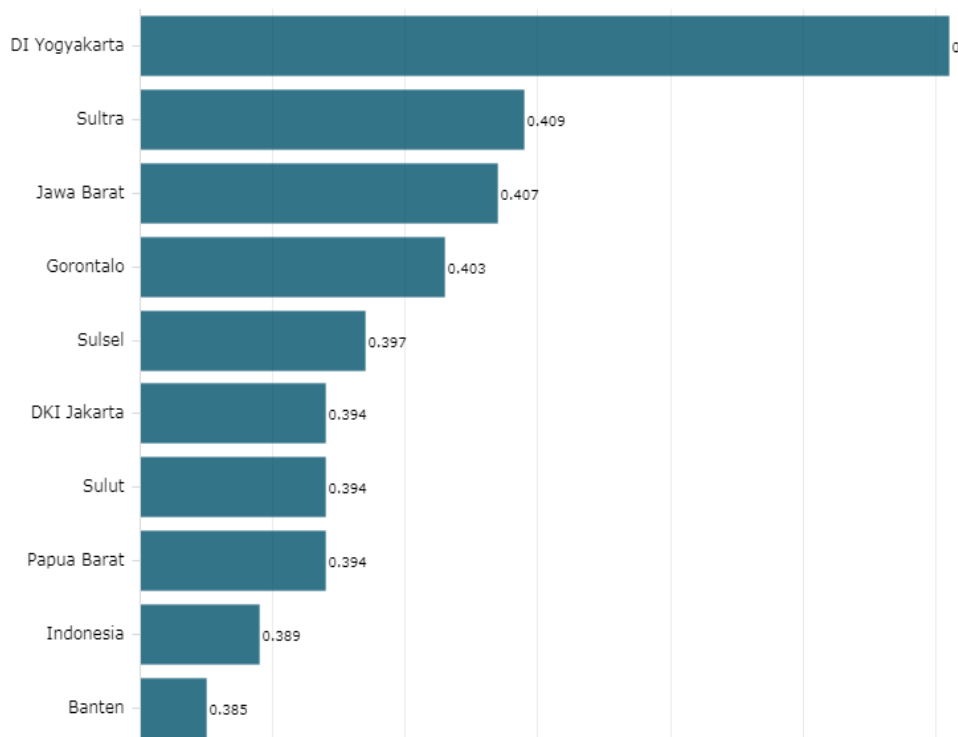
Noegroho dan Soelistianingsih (2007), mengatakan bahwa ketimpangan sering terjadi secara nyata di wilayah provinsi itu sendiri. Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi pada satu titik. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani

kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.

Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap daerah (Amrillah, 2013). Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi dengan Gini rasio sebesar 0,441. Di urutan kedua Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Gini ratio sebesar 0,409 dan ketiga Jawa Barat 0,407. Dari 10 provinsi dengan Gini ratio tertinggi, delapan di antaranya di atas angka ketimpangan nasional. Bahkan angka ketimpangan di empat provinsi justru mengalami kenaikan. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka Gini ratio nasional pada Maret 2018 turun menjadi 0,389 dari posisi September 2017 sebesar 0,391 maupun posisi Maret 2017 sebesar 0,393. Penurunan ketimpangan ini sejalan dengan turunnya angka kemiskinan menjadi 9,82% pada Maret 2018 dibanding pada September 2018 sebesar 10,12% maupun posisi Maret 2017 sebesar 10,64%. Beberapa analis menganggap

bahwa penurunan angka ketimpangan tersebut semu karena masih bergerak fluktuatif dan didukung oleh program bantuan sosial (bansos) dan bukan karena perbaikan struktural. Jika program bansos tidak kontinyu atau ada kejadian diluar kendali (shock therapy) maka dan angka kemiskinan maupun ketimpangan akan kembali naik.



Grafik 1.1 10 Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi tahun 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Juli 2018

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah yang semakin bertambah lebar akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Implikasi yang ditimbulkan berupa kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang berada di wilayah relatif miskin atau terbelakang (*underdeveloped region*) dengan masyarakat di wilayah relatif kaya atau maju (*developed region*). Kecemburuan ini dapat berlanjut menjadi masalah politik dan

dapat menyebabkan terganggunya keamanan dalam masyarakat (Syafriзал, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara (Jonaidi, 2012). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu : (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja ditahun-tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu, PDRB harga konstan merupakan tolok ukur yang paling mendekati dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, karena PDRB harga konstan merupakan perkembangan produksi riil suatu daerah tanpa memasukkan unsur inflasi. Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika

pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2018 (Persen)

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,91	5,87	6,20	6,17
2.	Jabar	6,5	6,5	6,34	5,09	5,05	5,66	5,35	5,64
3.	Jateng	5,3	5,34	5,14	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32
4.	DIY	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20
5.	Jatim	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,46	5,50
6.	Banten	7,03	6,83	7,13	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81
7.	Bali	6,66	6,96	6,69	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35

Sumber : data BPS, diolah, berbagai tahun penerbitan

Dari tabel di atas terlihat adanya perbedaan laju pertumbuhan PDRB diantara provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Dilihat dari nilainya, terlihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat kedua terbawah setelah provinsi Jawa Tengah diantara enam provinsi lainnya. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam delapan tahun terakhir tumbuh 5,3% per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong lambat dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa dan Bali. Provinsi Bali dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa dan Bali sebesar 6,4% kemudian diikuti oleh Banten dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,1%, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,8%, Provinsi Jawa Barat sebesar 5,7% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,2%.

Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 5 kabupaten/kota di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Tabel 1.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	13.308.338	13.733.466	14.240.971	14.723.215	15.239.197
Bantul	13.803.938	14.344.062	14.928.875	15.495.843	16.063.284
Gunungkidul	13.500.687	13.999.818	14.535.223	15.031.868	15.590.617
Sleman	20.288.637	21.220.835	22.218.342	23.161.987	24.120.028
Yogyakarta	46.384.233	48.262.989	50.262.263	52.278.315	54.305.690

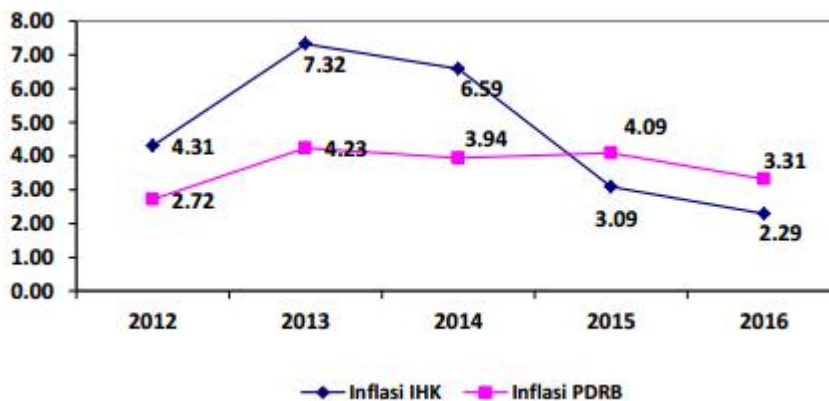
Sumber: data BPS dan Bappeda, diolah, berbagai tahun penerbitan

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat nilai PDRB ADHK tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadi perbedaan mencolok antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo. Nilai PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai lebih 3,5 kali lipat PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo. Di regional DIY PDRB ADHK Kota Yogyakarta memang fantastis tinggi sehingga bila dibandingkan dengan Kabupaten Sleman yang mempunyai PDRB ADHK paling tinggi di antara tiga kabupaten lain, maka PDRB ADHK Kota Yogyakarta sebesar 2,25 kali lipatnya. Hal ini menunjukkan tingkat persebaran pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta tidak merata. Pendapatan yang rendah di

Kulon Progo menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kulon Progo masih rendah. Nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Selain PDRB ADHK, variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Inflasi. Inflasi juga berperan penting dalam menentukan kondisi perekonomian, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan khususnya otoritas moneter yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi. Dalam jangka panjang variabel jumlah uang beredar, suku bunga dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia (Maggi, 2013). Inflasi mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi seperti penetapan harga dan upah, konsumsi dan investasi. Melalui keputusan-keputusan tersebut, inflasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian. Inflasi ditemukan memiliki dampak progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

A.W. Phillips (2000) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka pengangguran berkurang. Berkurangnya pengangguran akan berdampak pada peningkatannya pertumbuhan ekonomi.



Grafik 1.2 Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2012-2016 (persen)

Sumber : Bps Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa perkembangan kedua jenis angka inflasi dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang berbeda. Gejolak harga konsumen lebih mudah berfluktuasi karena gejolak harga di tingkat konsumen langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Fluktuasi yang terjadi pada angka inflasi IHK biasanya dipengaruhi oleh kondisi stok barang dan jasa serta proses distribusinya.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/ daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM

salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.

Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, terdapat perbedaan Indeks Pembangunan Manusia antar daerah di Provinsi D.I Yogyakarta. Pada tahun 2018, Kota Yogyakarta menempati urutan pertama dengan rata-rata 8,11 diikuti Kabupaten Sleman dengan IPM 83,42. Kemudian Kabupaten Bantul dengan 79,45 lalu Kabupaten Kulonprogo 73,76 dan yang terakhir Kabupaten Gunungkidul 69,24.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2018

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kulonprogo	68,8	69,5	69,7	70,1	70,6	71,5	72,3	73,2	73,7
Gunungkidul	75,3	75,5	76,1	76,7	77,1	77,9	78,4	78,6	79,4
Bantul	64,2	64,8	65,6	66,3	67,0	67,4	67,8	68,7	69,2
Sleman	79,6	80,0	80,1	80,2	80,7	81,2	82,1	82,8	83,4
Yogyakarta	82,7	82,9	83,2	83,6	83,7	84,5	85,3	85,4	86,1

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan aspek pelayanan. Dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja baru. Dan dukungan akses layanan yang baik menjadikan tingkat kemiskinan semakin menurun dan pendapatan perkapita semakin meningkat.

Infrastruktur berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat meningkatkan hasil produksi, membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumadiasa, 2016).

Suatu daerah yang mempunyai infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Misalnya infrastruktur jalan, jalan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan tersedianya jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan orang, sehingga biaya distribusi lebih rendah dan harga dapat bersaing dipasaran. Selain infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, contohnya pusat-pusat pendidikan, dan kesehatan. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2014).

Tabel 1.4 Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Keadaan Jalan (KM) Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2010 - 2019

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulonprogo	400	383	512	535	485	518	503	402	312	345
Gunungkidul	412	416	438	452	462	479	467	596	596	598
Bantul	386	411	417	418	441	330	327	271	283	251
Sleman	346	372	394	378	360	379	366	372	374	467
Yogyakarta	99	111	124	137	143	145	206	104	191	205

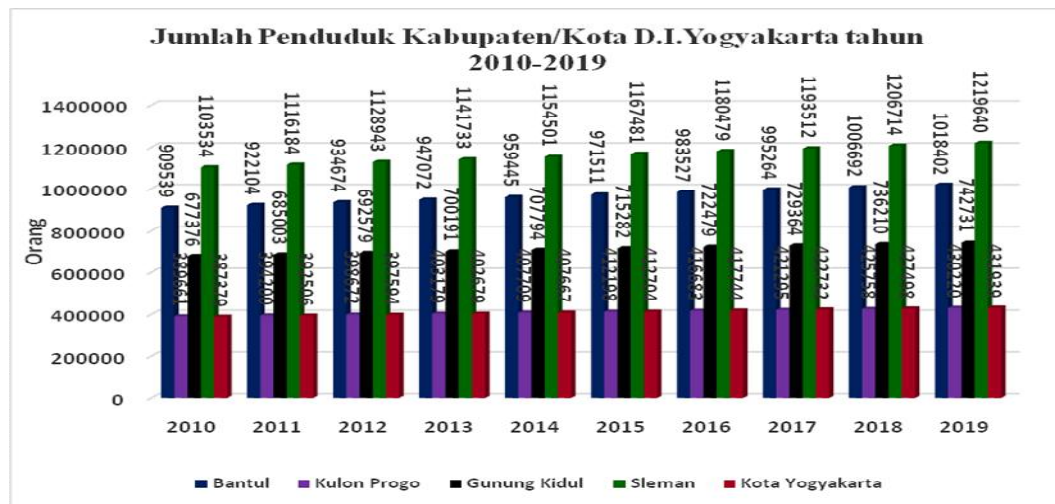
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta ,berbagai tahun penerbitan

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan

tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian di memungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat

kemiskinan akan turun. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan.



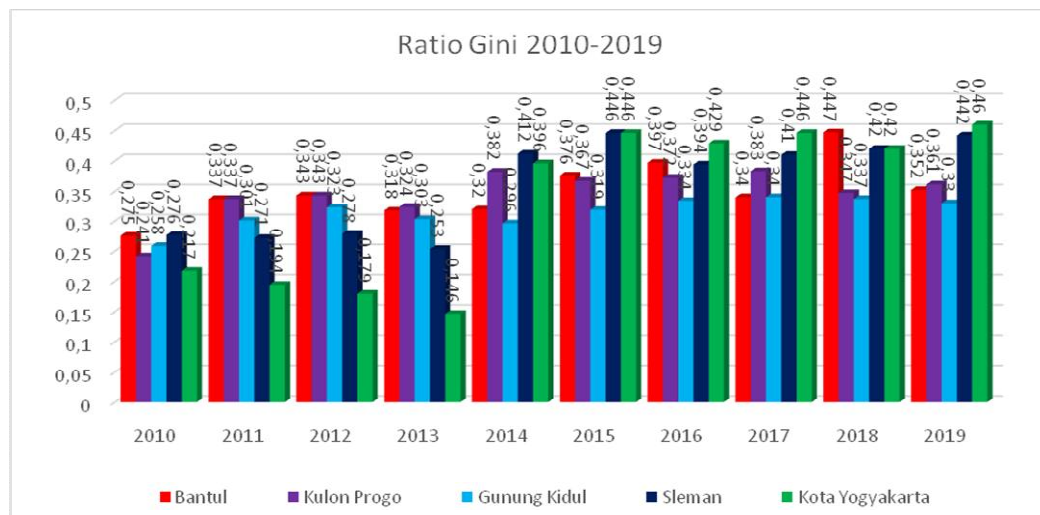
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa) Tahun 2010-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 3.842.932 jiwa. Kabupaten Sleman menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk sebanyak 1.219.640 jiwa. Kemudian disusul Kabupaten Bantul yang berpenduduk 1.018.402 jiwa, lalu Kabupaten Gunungkidul sebanyak 742.731 jiwa. Diurutan keempat ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 742.731 jiwa serta yang terakhir adalah kabupaten Kulonprogo dengan 430.220 jiwa.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masingmasing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju.

Indeks Gini menghitung ketimpangan dengan membuat klasifikasi 10 tingkatan pendapatan dalam masyarakat. Sepuluh tingkat golongan tersebut dihubungkan dengan 10 golongan penerima pendapatan tersebut. Sehingga akan terlihat bagaimana total pendapatan dalam masyarakat terdistribusikan. Indeks Gini berkisar dari angka 0 (kemerataan sempurna) sampai angka 1 (ketidakmerataan sempurna). Apabila indeks Gini telah mencapai angka 0,4 maka dapat dikatakan ketimpangan wilayah tersebut tergolong parah.



Grafik 1.4 Rasio gini antar Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019

Sumber: BPS DIY dari berbagai tahun penerbitan

Berdasarkan grafik 1.4 pada tahun 2010 – 2019 dapat dilihat bahwa rasio gini di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong tinggi serta memperlihatkan pemerataan pendapatan belum cukup merata. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul **“Analisis Pengaruh PDRB per Kapita, Inflasi, IPM, Infrastruktur Dan Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2019”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, dimana setiap daerah memiliki permasalahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti supaya lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di DIY dengan melibatkan data seluruh kabupaten/kota di DIY. Periode tahun yang dianalisis yaitu dari 2010 - 2019. Terutama untuk factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, penelitian ini difokuskan pada analisis dengan melibatkan lima variabel bebas dari sisi ekonomi dan non-ekonomi. Empat variabel tersebut adalah 1) PDRB per kapita, 2) Inflasi, 3) IPM, 4) Infrastruktur dan 5) Jumlah Penduduk. Adapun indikator masing-masing variabel secara berurutan adalah sebagai berikut: Variabel PDRB per kapita digunakan sebagai ukuran rata-rata kemakmuran masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian di DIY, Inflasi merupakan representasi kenaikan harga barang/jasa. IPM merupakan representasi dari tingkat kualitas hidup sumber daya manusia. kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran daerah dan jumlah populasi dari daerah tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019?

2. Bagaimana pengaruh inflasi Kapita terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019?
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

1. Penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Pemerintah daerah sebagai pertimbangan alternatif untuk menyusun kebijakan ekonomi dan sebagai sumber informasi tentang kinerja masing-masing sektor serta mengambil kebijakan atas terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Akademisi sebagai tambahan referensi mengenai masalah ketimpangan pendapatan.